

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab II ini membahas tentang kajian pustaka yang berisi tentang teori-teori yang relevan sebagai mempertajam analisa. Sebagai acuan dan perbandingan dengan penelitian yang penulis akan lakukan. Bab II turut memaparkan konsep dan teori, keduanya sangat diperlukan penelitian, karena keduanya saling terkait untuk menjawab pokok masalah yang ada.

2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian, sehingga penulis dapat memperluas teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Selain itu, seiring dengan perkembangan teknologi yang sangat beragam dalam perilaku politik yang dapat dilakukan oleh masyarakat khususnya para pemilih pemula.

Pertama, penelitian dari H. Basuki Rachmat dan Esther 2015 “ Perilaku Pemilih Pemula Dalam Pilkada Serentak Di Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang Tahun 2015 ”. Jumlah Penduduk sebanyak 38.369 jiwa, penduduk yang katgori pemilih pemula adalah sebanyak 3.724 jiwa yaitu antara usia 15 - 19 tahun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, pada Pasal 1 ayat (22), pemilih pemula adalah penduduk yang sudah berusia 17 tahun keatas. Pemilih yang belum menikah. Berarti usia 15 tahun dan 16 tahun dapat diwajibkan untuk memilih asalkan sudah menikah. Berdasarkan data yang diperoleh dari KPU Kecamatan Ciomas, bahwa penduduk yang berusia 15 sampai 17 tahun sejumlah

sebanyak 373 jiwa, yaitu sebesar 10 % dari total jumlah penduduk Kecamatan Ciomas. Dari 373 jiwa yang berhak memiliki usia 15-16 tahun yang sudah menikah sebanyak 60 jiwa, sedangkan sisanya sebanyak 313 yang berusia 17 tahun.

Masalah penelitian adalah pendekatan yang diakibatkan dari faktor kedekatan, ikut-ikutan karena orang tua atau suami dari pemilih.

Teori yang digunakan oleh H. Basuki Rachmar dan Esther merupakan teori perilaku politik. Teori perilaku politik yang dikemukakan oleh Jack C. Plano bahwa perilaku dapat dipahami sebagai pikiran atau tindakan manusia yang berkaitan dengan proses pemerintahan. Dalam hal ini yang termasuk perilaku politik adalah tanggapan-tanggapan internal (pikiran, persepsi, sikap dan keyakinan) dan juga tindakan-tindakan yang nampak (pemungutan sura, gerak protes, lobi, kaukus dan kampanye). jadi perilaku tidak hanya diartikan sebagai pemikiran ataupun tanggapan yang bersifat abstrak, tapi juga sebagai tindakan-tindakan dari perilaku politik tertentu.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif dengan pola 2 (dua) tahap, sejalan dengan metode yang digunakan, yakni metode studi kasus. Alasan pemilihan studi kasus adalah sebagaimana dijelaskan oleh Merriam, Yin dalam Creswell (1994 : 12), bahwa : melalui studi kasus diharapkan yang dihasilkan pada Kabupaten/Kota lokasi penelitian akan dapat direpresentasikan atau digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan kasus-kasus serupa di Kabupaten/Kota lain.

Hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Perilaku Pemilih Pemula di Kecamatan Ciomas pada Pemilu 2015 untuk melihat perilaku pemilih pemula ada beberapa pendekatan yang dilihat menurut Dennis Kavanagh melalui buku-nya yang berjudul *Political Science and Political Behavior* , menyatakan terdapat tiga model untuk menganalisis perilaku pemilih, yakni pendekatan sosiologis, psikologi sosial,

dan pilihan rasional. Merujuk pada hasil studi serta pendekatan-pendekatan di atas, penelitian ini mencoba menggambarkan dan menganalisis tentang kecenderungan perilaku pemilih pemula.⁹

Kedua, penelitian dari Hendra Aditya Pratama 2019 “ Perilaku Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019 Di Kabupaten Soppeng (Studi Kasus Di SMK Negeri 3 WatanSoppeng) “.

Masalah penelitian adalah perilaku pemilih pemula di Kabupaten Soppeng masih cukup memprihatinkan, dimana dalam hal ini peneliti terlebih dahulu melakukan pbservasi awal sehingga menemukan beberapa gejala yang harus mendapatkan perhatian, diantaranya, Pelajar atau yang tergolong pemilih pemula di Kabupaten Soppeng dalam menentukan pilihan mereka hanya sekedar ikut-ikutan, dimana dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu ikut-ikutan kawan, pengaruh keluarga dan lingkungan tempat tinggalnya serta adanya iming-iming ataupun imbalan dari oknum atau calon kandidat dimana hal itu berupa uang atau barang kebutuhan sehari-hari dan biasanya hanya dilakukan pada saat menjelang pemilihan berlangsung sehingga efeknya sangat singkat dan nyata.

Teori yang dilakukan oleh Hendra Aditya Pratama merupakan teori perilaku pemilih yang hal ini dapat berupa komitmen maupun masyarakat yang merasa oleh suatu ideologi tertentu yang kemudian termanifestasikan dalam institusi politik seperti politik dan seorang pemimpin (Firmanzah, 2007). Aktivitas pemberian suara oleh individu yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih dan tidak memilih (*to vote or not to vote*) di dalam suatu pemilu maka voters akan memilih atau mendukung kandidat tertentu, Ramlan Surbakti (dalam Efriza 2012; 480).

⁹ H. Basuki Rachmat dan Esther. “ Perilaku Pemilih Pemula Dalam Pilkada Serentak Di kecamatan Ciomas Kabupaten Serang Tahun 2015, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2020. Diakses pada 17 Mei 2022. <https://eprints.ipdn.ac.id>

Penelitian ini memakai metode kualitatif yaitu jenis penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang serta perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif yaitu bentuk penelitian yang meneliti dengan metode atau pendekatan studi kasus (*case study*). penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada suatu obyek tertentu yang mempelajari sebagai sebuah kasus.

Hasil dari penelitian tersebut adalah tentang perilaku politik pemilih pemula di Kabupaten Soppeng (Studi Kasus SMK Negeri 3 Watansoppeng) yang mengacu pada indikator perilaku pemilih yaitu kegiatan pemberian suara oleh individu yang berkaitan erat dengan aktivitas pemilihan atau pengambilan keputusan untuk memilih dan tidak memilih (*to vote or not to vote*) di dalam suatu pemilu maka voters akan memilih atau mendukung kandidat tertentu¹⁰

Ketiga, penelitian dari Rustan IR dan Munawir Ariffin “ Perilaku Pemilih Pemula Pada Pemilihan Bupati Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat Periode 2019-2024 “. Perilaku pemilih pemula memiliki karakteristik yang biasanya masih labil dan apati, pengetahuan politiknya kurang, cenderung mengikuti kelompok sepermainan dan mereka baru belajar politik khususnya dalam pemilihan umum. Ruang-ruang tempat di mana mereka belajar politik biasanya tidak jauh dari ruang yang dianggap memberikan rasa kenyamanan dalam diri mereka. Adapun ruang-ruang tempat belajar politik tersebut yaitu ruang keluarga, pengaruh teman sebaya dan media massa. Hal itu penting karena pemilih pemula adalah pemilih yang ikut andil menentukan pemimpin di daerah tertentu. Perilaku pemilih pemula menjadi indikator kualitas demokrasi secara substansial pada saat ini dan masa akan datang. Karena kondisinya masih labil dan mudah diberikan wawasan politik dan demokrasi secara benar baik dari suprastruktur politik maupun infrastruktur politik.

¹⁰ Hendra Aditya Pratama. “ Perilaku Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019 Di Kabupaten Soppeng (Studi Kasus Di SMK Negeri 3 WatanSoppeng)”, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019 “. Diakses pada 22 Mei 2022. <https://digilibadmin.unismuh.ac.id>

Masalah penelitiannya adalah bagaimana kecenderungan perilaku pemilih pemula dalam menjatuhkan pilihannya pada pasangan calon bupati dan wakil bupati di kecamatan campalagian pada pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten polewali mandar provinsi sulawesi barat periode 2019-2024.

Teori yang digunakan oleh Rustan IR dan Munawir Ariffin adalah teori perilaku pemilih. Menurut Dennis Kanavagh dalam bukti melalui bukunya yang berjudul *Political Science and Political Behavior*, menyatakan bahwa terdapat tiga model untuk menganalisis perilaku pemilih, yakni pendekatan sosiologis, psikologi sosial, dan pilihan rasional.

Penelitian ini memakai metode penelitian deskriptif kualitatif, dimana penelitian ini dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek menyeluruh dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemilihan Umum Bupati Polewali Mandar 2018 (selanjutnya disebut Pilkada Polewali Mandar 2018) merupakan Pemilihan Umum di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Periode 2019-2024. ini merupakan Pemilihan Bupati secara langsung ketiga setelah Pilkada Polewali Mandar pada Periode 2009-2013 dan 2014-2019.¹¹

¹¹Rustan IR dan Munawir Ariffin. "Perilaku Pemilih Pemula Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat Periode 2019-2024, Universitas Al Asyariah Mandar, 2019. Diakses pada 25 Mei 2022. <https://journal.lppm-unasman.ac.id>

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Teori Perilaku Memilih (Voting Behavior)

Perilaku pemilih (*voting behavior*) merupakan tingkah laku seseorang dalam menentukan pilihannya yang dirasa paling disukai atau paling cocok. Sedangkan menurut Haryanto (2000), *Voting* adalah: “Kegiatan warga negara yang mempunyai hak untuk memilih atau menentukan wakil-wakilnya”. Perilaku memilih (*voting behavior*) menurut Jack C Plano adalah dimaksudkan sebagai suatu studi yang memusatkan diri pada bidang yang menggeluti kebiasaan atau kecenderungan pilihan rakyat dalam pemilihan umum, serta latar belakang mengapa mereka melakukan pemilihan itu (Plano, 1985). Budiardjo (2001) mendefinisikan *voting behavior* sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau (*lobbying*) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan direct actionnya dan sebagainya.

Ada dua macam teori *voting behavior* yang dapat dikelompokkan dalam dua mashab besar. Pertama, pendekatan voting dari mashab sosiologis dan dipelopori oleh Columbia's University Bureau of Applied Social Science. Kedua, pendekatan voting dari mashab psikologis yang dikembangkan oleh University of Michigans Survey Research Center (Gaffar, 1992:4-9). Menurut Muluk (2012) kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh seorang warga negara yang memiliki hak untuk memilih dan terdaftar sebagai pemilih untuk melakukan pencoblosan melalui surat suara.

Hubungan perilaku memilih (*voting behavior*) dalam Pemilu, menurut Asvi Warman (1999), dijelaskan bahwa paling sedikit ada dua model yang menjelaskan mengapa orang memilih sebuah partai. Pertama pendekatan sosiologis dan psikologis¹²

Dalam teori voting behavior, penjelasan pilihan pemilih berdasarkan pertimbangan isu dan kandidat di atas juga dikenal sebagai teori spasial. Teori ini mengasumsikan bahwa para pemilih kandidat yang paling mewakili¹³ posisi kebijakan kandidat yang dapat memaksimalkan suara mereka. Kedekatan antara kandidat dengan pemilih merupakan suatu hal yang harus di pertimbangkan dalam memahami tingkah atau perilaku pemilih terhadap menentukan suatu pilihannya. Oleh karena itu, respon seseorang terhadap suatu pertanyaan yang berhubungan dengan suatu isu dianggap untuk menyatakan apakah mereka mempunyai perasaan positif dan negatif terhadap simbol tersebut.

2.2.2 Tipe Pemberi Suara dan Perilaku Pemilih

Studi tentang pemilihan umum juga mengajiskan beberapa tipe pemberi suara dan perilaku pemilih, yang merupakan individu-individu yang memiliki daya seleksi dan daya tangkal serta daya serap masing-masing. Dan Nimmo (2000: 162-172), mengemukakan empat tipe dalam pemberian suara dalam pemilihan umum, yaitu: (1) tipe rasional; (2) tipe reaktif; (3) tipe responsif; dan (4) tipe aktif. Penjelasan keempat tipe tersebut disajikan berdasarkan pemaparan Nimmo (ibid), sebagai berikut:¹⁴

Tipe rasional adalah pemberi suara yang rasional, yang sesungguhnya merupakan aksional diri, yaitu sikap yang intrinsik pada setiap karakter personal pemberi suara yang turut memutuskan pemberian suara kepada kebanyakan warga negara. Orang yang rasional: (1) selalu dapat mengambil keputusan bila dihadapkan pada alternatif; (2) memilih alternatif-

¹² <http://repository.uin-suska.ac.id> Diakses pada tanggal 10 Juni 2022

¹³ Ibid

¹⁴ Prof. Dr. Anwar Arifin, Perspektif Ilmu Politik, (PT RajaGrafindo Persada, Jakarta:2015),hlm.115.

alternatif secara sadar; (3) menyusun alternatif-alternatif dengan cara paling tinggi; dan (5) selalu mengambil keputusan yang sama bila dihadapkan pada alternatif-alternatif yang sama.

Pemberi suara rasional berminat secara aktif terhadap politik, rajin berdiskusi dan mencari informasi politik, serta bertindak berdasarkan prinsip yang tidak hanya untuk kepentingan diri-sendiri, tetapi juga untuk kepentingan umum. Demikian juga pemberi suara rasional mampu bertindak secara konsisten dalam menghadapi tekanan dan kekuatan politik.

Tipe reaktif adalah pemberi suara yang memiliki ketertarikan emosional dengan partai politik. Ikatan emosional kepada partai sebagai identifikasi partai, yakni sebagai sumber utama aksi diri dan pemberi suara yang reaktif. Identifikasi dengan partai meningkatkan citra yang lebih menguntungkan tentang catatan dan pengalamannya, kemampuan dan atribut personalnya. Dengan demikian, identifikasi dengan partai meningkatkan tabir perseptual sehingga individu dapat melihat keuntungan bagi orientasi kepartaiannya. Semakin kuat ikatan partai itu, semakin dibesar-besarkan proses seleksi dan distorsi persepsinya.

Tipe responsif adalah pemberi suara yang mudah berubah dengan mengikuti waktu, peristiwa politik dan kondisi-kondisi sesaat. Meskipun memiliki kesetiaan kepada partai, tetapi afiliasi itu ternyata tidak memengaruhi perilakunya dalam pemberian suara. Hubungan dengan partai lebih rasional ketimbang emosional. Pemberi suara yang responsif lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor jangka pendek yang penting dalam pemilihan umum tertentu, dibanding oleh kesetiaan jangka panjang kepada kelompok atau kepada partai.¹⁵

Tipe aktif adalah pemberi suara yang terlihat aktif dalam menginterpretasikan peristiwa, isu, partai dan personalitas, dengan menetapkan dan menyusun maupun menerima,

¹⁵ Ibid. Hlm 116.

serangkaian pilihan yang diberikan. Para pemberi suara merumuskan citra politik tentang apa yang diperhitungkan oleh mereka dengan berbagai varian.

Selain itu Anwar Arifin (2010: 109) menambahkan adanya satu tipe yang ditemukan sebagai realitas konkret di lapangan, yaitu **tipe transaksional**. Mereka adalah tipe pemberi suara yang mengambil keputusan dari sejumlah opsi, berdasarkan “transaksi”, berupa “hadiah” atau “fasilitas”. Meskipun simpatisan atau anggota dalam satu partai, ia dapat memilih kandidat dari partai lain, berdasarkan *transaksi* yang dikenal sebagai aplikasi dari “politik uang” (*money politics*) yang berlangsung dalam “pasar gelap” (*black market*) politik. Tipe ini ternyata jumlahnya sangat banyak di Indonesia, bukan saja bisa terjadi di kalangan elite, tetapi juga di kalangan orang banyak terutama dari kalangan orang-orang miskin dan kurang pendidikan, seperti para penganggur, preman, pengamen, dan banyak lagi.¹⁶

Tipe pemberi suara tersebut dikenal juga dengan sebutan perilaku pemilih dalam ilmu politik. Seorang individu dapat saja memiliki gabungan beberapa tipe, sesuai dengan situasi dan kondisi yang berlangsung dalam suatu pemilihan umum.

Tipe pemberi suara atau perilaku pemilih lainnya adalah individu-individu yang memilih berdasarkan kelas (*strata*), seperti kelas bawah, kelas menengah dan kelas atas. Individu-individu calon pemberi suara dalam pemilihan umum mempersepsikan citra diri kelas (*strata*). Artinya rakyat akan memberikan suaranya kepada partai atau kandidat dengan mengacu kepada kelas sosial tersebut, tempat mereka mengidentifikasi diri dan menganggap dirinya sebagai anggotanya. Hal yang sama dapat juga terjadi pada perilaku pemilih yang lain seperti kelompok buruh, pengusaha, petani, nelayan, cendekiawan, agamawan, perempuan, pemuda dan sebagainya. Kelompok-kelompok tersebut merupakan

¹⁶ Ibid. Hlm 117.

kelompok kepentingan (*interest group*) yang memiliki kebutuhan dan kepentingan yang dijaga, diperjuangkan dan dilindunginya.

Adanya sejumlah orang yang melakukan tindakan politik (*political action*) atau perilaku politik (*political behavior*) yang sengaja tidak menggunakan haknya untuk memilih dalam pemilihan umum, merupakan bentuk kegagalan kampanye politik, sosialisasi politik, dan komunikasi politik. Setiap individu memang aktif dan memiliki sifat “kepala batu” (*obstinate audience*) dalam menentukan sikap atau perilakunya dalam pemilihan umum.¹⁷

Sejarah pemilihan umum menunjukkan bahwa di semua negara demokrasi selalu terdapat sejumlah orang yang tidak ikut dalam memberikan suaranya, baik karena disengaja mauun karena tidak terdaftar sebagai pemilih. Hal itu merupakan bentuk perilaku politik yang berkaitan dengan budaya politik (*political culture*) setiap individu dalam pemilihan umum.

Pemilihan umum yang bebas, menurut Huntington (1991: 9) merupakan *definisi minimal demokrasi*, yang mengharapkan lainnya tindakan politik atau perilaku politik pemilih sebagai bagian dari partisipasi politik (*political participation*) warga negara. Keikutsertaan warga negara memberikan suaranya dalam pemilihan umum merupakan salah satu bentuk partisipasi yang dikenal sebagai partisipasi minimal. Naum selalu saja terdapat orang-orang yang tidak menggunakan hak politiknya dengan tidak memberikan suaranya dalam pemilihan umum.

2.2.3 Perspektif dan Persepsi Pemberi Suara

¹⁷ Ibid. Hlm 118.

Tindakan pemberian suara dalam pemilihan umum, didasarkan kepada berbagai pertimbangan. Berbagai macam teori politik dan komunikasi politik menunjukkan betapa kuatnya peranan individu dalam menghadapi semua pengaruh yang berasal dari luar dirinya. Teori khalayak kepala batu (*the obstinate audience theory*) misalnya telah menjelaskan beberapa faktor yang membuat khalayak atau pemberi suara melakukan seleksi terhadap tindakan politik yang harus dilakukan.¹⁸

Faktor-faktor yang membuat individu pemberi suara menyaring semua pengaruh dari luar itu antara lain, keyakinan politik atau ideologi, persepsi politik, motivasi politik, sikap politik, citra politik dan dorongan politik. Di antara semua faktor ini ternyata bahwa faktor ideologi atau keyakinan politik, merupakan faktor penangkal yang kuat bagi individu, meskipun demikian, semua faktor “khalayak kepala batu” itu dalam menentukan pilihan dapat dirangkum dalam dua konsep, yaitu *perspektif* dan *persepsi*.

Perspektif menurut Fisher (1990: 131-1138), adalah sudut pandang bagi individu yang menjadi kerangka acuan dalam menilai, menanggapi dan menindaki sesuatu yang berasal dari luar dirinya. Sedangkan persepsi menurut Rakhmat (2005: 51) adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Justru itu, perspektif dan persepsi sangat ditentukan oleh faktor personal para pemberi suara.¹⁹

Selain itu, Dan Nimmo (2000; 175-77), menyebutkan tiga hal sangat penting dalam mempersepsi komunikasi tentang isi politik dan kandidat yang diterima selama kampanye dalam pemilihan umum yaitu, atribut, perspektif, dan persepsi pemberian suara.

¹⁸ Prof. Dr. Anwar Arifin, *Perspektif Ilmu Politik*, (PT RajaGrafindo, Jakarta:2015), hlm. 124.

¹⁹ *Ibid.* Hlm 125.

Pemberian suara mengalihkan pilihannya dari satu partai politik kepada partai politik lain atau dari satu kandidat kepada kandidat lain, disebabkan karena adanya atribut sosial dan demografi. Artinya, pemberian suara menjatuhkan pilihan kepada partai politik atau kandidat tertentu yang memiliki visi, misi, program, yang berkaitan dengan kepentingan sosial dan demografinya. Misalnya, karyawan akan memberi jaminan sosial dan perbaikan kepada karyawan tersebut. Begitu juga pengusaha akan memberi perhatian kepada isu tentang perbaikan ekonomi dan keringanan pajak.

Atribut sosial dan demografi menerangkan juga tentang perspektif pemberi suara terutama yang menyangkut *citra diri politik* yang mencakup: (1) citra diri partisan, (2) citra diri kelas, (3) citra diri ideologis, dan (4) citra diri jabatan yang ideal. Selanjutnya Nimmo (2000: 178-183), menjelaskan keempat hal tersebut yang diringkas dalam paparan berikut.

Citra diri partisan, yaitu melakukan pemberian suara tanpa terpengaruh oleh isu, kandidat dan peristiwa. Sebagai partisan partai, ia memberikan suaranya kepada partai tersebut. sedang *citra diri kelas*, yaitu pemberi suara yang mengacu kepada kelas sosial sebagai anggotanya, seperti kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Selanjutnya, *citra diri ideologi* menunjukkan bahwa para pemilih memberikan suaranya kepada partai atau kandidat yang sesuai dengan ideologi politiknya.²⁰

Selain itu, pemberi suara akan menjatuhkan pilihannya kepada kandidat sesuai dengan *citra diri jabatan ideal* baginya. Pada umumnya pemilih mencari sifat abstrak seperti: kedewasaan, kejujuran, kecerdasan, kesungguhan, kegiatan dan energi. Hal itu merupakan gabungan dari sifat *kepahlawanan politik*. Dengan kata lain, pemilih akan mencari pahlawan

²⁰ Ibid. Hlm 126.

politik untuk dipilih menduduki jabatan tertentu seperti; presiden, gubernur, dan anggota parlemen.²¹

Hal yang tak kalah pentingnya adalah persepsi khalayak sebagai *citra politik* yang khas pemilihan umum, yang akan menentukan pilihan para pemilih. Para pemberi suara akan secara selektif mempersepsi: partai, kandidat, isu (visi, misi, dan program), peristiwa dalam kampanye, memberi makna kepada mereka, dan berdasarkan itu menentukan pemberian suara. Melalui proses penafsiran, para pemilih menyusun citra jangka pendek tentang kampanye.

Persepsi khalayak terhadap partai politik dan kandidat yang akan dipilih, menurut Nimmo (2000: 184-185) ditentukan juga oleh citra partai, citra kandidat dan isu politik dalam kampanye. Citra partai adalah apa yang dipercaya dan diharapkan tentang mengidentifikasi dirinya dengan partai politik tertentu, meskipun ia tidak menyukai apa yang dilakukan oleh partai politik itu. Dengan kata lain, citra partai politik secara efektif akan memainkan peranan sebagai penengah yang menerjemahkan apa yang berlangsung dalam lingkungan politik ke dalam makna para pemberi suara dalam pemilihan umum.

Selain itu, pemberi suara akan memerhatikan juga citra kandidat (calon), yaitu atribut politik dan gaya personal kandidat politik seperti yang dipersepsikan oleh pemberi suara, membentuk citra para pemilih tentang orang yang berusaha menjadi pejabat. Telah dijelaskan di muka bahwa pemberi suara memilih kandidat berdasarkan sifat-sifat yang diharapkan dari yang berkampanye tentang pemegang jabatan yang ideal, yang dirangkum dalam satu konsep, yaitu pahlawan politik. Citra kandidat dapat mengalahkan citra-citra lain.

Akhirnya, yang menjadi perhatian pemberi suara adalah isu politik, visi, misi dan program partai politik atau kandidat. Para pemilih akan memilih partai politik atau kandidat

²¹ Ibid. Hlm 127.

yang sesuai dengan persepsi pemberi suara terhadap isu politik (visi, misi, dan program politik, yang dikembangkan dalam kampanye pemilihan umum.

Dengan banyaknya faktor yang memengaruhi pemberi suara tersebut, maka partai politik atau kandidat yang melakukan kampanye harus dengan cermat mengkaji faktor yang paling dominan bagi setiap individu atau kelompok. Memahami calon pemberi suara atau calon pemilih, dalam pemilihan umum dan komunikasi politik menjadi sangat penting.

2.2.4 Orientasi Pemberian Suara

Selain perspektif dan persepsi pemberian suara yang telah dibentangkan di muka, ternyata pemberi suara juga memiliki orientasi dalam menentukan pilihannya. Dalam menetapkan orientasi itu, Dan Nimmo (2000: 202-205) memperkenalkan tiga teori umum tentang peran komunikasi dalam pemilihan umum, yaitu: (1) teori kehendak rakyat, (2) teori kontrol rakyat, dan (3) teori dukungan rakyat. Ketiga teori tersebut lebih lanjut disarikan dari Nimmo yang dipaparkan di bawah ini.²²

Teori kehendak rakyat mempunyai fokus kognisi, dalam hal bahwa pemberi suara berorientasi kepada tujuan yang antara dan tertentu serta memiliki minat aktif terhadap kampanye pemilihan umum dan mempunyai pengetahuan tentang isu-isu yang penting, itu dengan tindakan politik. Itulah sebabnya pemilihan umum pada dasarnya menyingkapkan kehendak rakyat dengan akurat mencerminkannya dalam pembuatan kebijakan. Distribusi suara adalah mandat kebijakan yang dikomunikasikan kepada pejabat pemerintah yang mendukung beberapa usul dan menolak usul-usul yang lain.

²² Ibid. Hlm 128.

Teori kontrol rakyat memiliki fokus afeksi ketimbang instrumental. Teori ini menekankan bahwa pemberi suara yang berorientasi kepada partai dengan pertimbangan berdasarkan standar kepartaian dan ideologi, dan serta restrospektif menilai pembuatan kebijakan selama masa tugasnya, baik atau buruk, dan dengan demikian menentukan siapa yang akan “masuk atau “keluar” di antara yang mencalonkan diri untuk menjadi pejabat. Jadi, pemilihan umum bukan untuk menyampaikan mandat kebijakan kepada pejabat, melainkan memilih pemerintahan untuk membuat kebijakan politik.

Teori dukungan rakyat mempunyai fokus ekspresif dan bukan instrumental atau evaluatif dan bukan kognisi atau afeksi. Dalam teori ini pemberi suara menyusun citra tentang kandidat atau partai, dan memproyeksikan kekhawatiran dan frustasinya, harapan dan aspirasinya, konsep diri, dan citra diri calon pejabat, sebagai alat untuk melepaskan diri dari ketegangan batin. Hal itu dilakukan oleh pemberi suara untuk mengukuhkan kembali kepercayaan kepada rasionalitas fundamental dan karakter demokrasi dari sistem itu sehingga dapat menetapkan tindakan yang sesuai dengan tujuan pada masa yang akan datang.²³

2.3 Teori Pemilih Pemula

Pemilih pemula mempunyai beberapa pengertian yang saat ini diterapkan. Ada tiga kategori pemilih pemula di Indonesia. Pertama, pemilih yang rasional, yaitu pemilih yang benar-benar memilih partai berdasarkan penilaian dan analisis mendalam (Rachmat & Esther, 2016). Kedua, pemilih kritis emosional, yakni pemilih yang masih idealis dan tidak kenal kompromi (Rachmat & Esther, 2016). Ketiga, pemilih pemula, yakni pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka baru memasuki usia memilih (Rachmat & Esther, 2016). dalam penelitian ini yang digunakan pengertian sebagai pemilih pemula adalah

²³ Ibid

pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka baru memasuki usia pemilih. Di Indonesia warga negara yang berhak memilih adalah warga negara yang telah genap berumur 17 tahun. Dalam UU No. 10 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (22) dijelaskan bahwa pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah genap berumur tujuh belas tahun atau sudah/belum kawin. Kemudian ada pasal 19 ayat (1 dan 2) UU No. 10 tahun 2008 yang menerangkan bahwa pemilih yang mempunyai hak memilih adalah warga negara Indonesia yang didaftar oleh penyelenggara Pilkada dalam daftar pemilih dan pada hari pemungutan suara telah genap berumur tujuh belas tahun atau lebih atau sudah pernah kawin. Pemilih pemula di Indonesia yang dalam artian sebagai pemilih yang baru memasuki usia pemilih tujuh belas tahun berjumlah sangat banyak dan dapat diperhitungkan dalam setiap penyelenggara Pemilu.

2.3.1 Pengertian Pemilih Pemula

Pemilih pemula merupakan warga negara Indonesia yang telah genap berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. Pemilih pemula dalam setiap pemilihan umum didaftarkan melalui pendataan yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh pelaksanaan pemilihan umum. Pemilih pemula adalah pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka baru memasuki usia pemilih yaitu 17 hingga 21 tahun.

Pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap Pemilu tidak berbeda jauh dengan kelompok lainnya, yang membedakan merupakan soal antusiasme dan preferensi. Adapun ketentuan yang harus dimiliki untuk menjadikan seseorang dapat memilih adalah:

1. WNI yang berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.
2. Tidak sedang terganggu jiwa dan ingatannya.
3. Terdaftar sebagai pemilih.

4. Bukan anggota TNI/ POLRI (Purnawirawan / Sudah tidak lagi menjadi anggota TNI / Kepolisian).

5. Tidak sedang dicabut hak pilihnya.

6. Terdaftar di DPT.

Pentingnya peranan pemilih pemula karena sebanyak 20 % dari seluruh pemilih adalah pemilih pemula, dengan demikian jumlah pemilih pemula sangatlah banyak, maka dari itu hak warga negara dalam menggunakan hak pilihnya janganlah sampai tidak berarti akibat dari mempunyai hak pilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar atau juga masih banyak kesalahan dalam menggunakan hak pilihnya.²⁴

Pemilih pemula khususnya remaja (berusia 17 tahun) mempunyai nilai kebudayaan yang santai, bebas, dan cenderung pada hal-hal yang informal dan mencari kesenangan, oleh karena itu semua hal yang kurang menyenangkan akan dihindari. Disamping mencari kesenangan, kelompok sebaya adalah paling penting dalam kehidupan seorang remaja, sehingga bagi seorang remaja perlu mempunyai kelompok teman sendiri dalam pergaulan.²⁵

Pemilih pemula memiliki antusiasme yang tinggi sementara keputusan pilihan yang belum bulat, sebenarnya menempatkan pemilih pemula sebagai swing voters yang sesungguhnya. Pilihan politik mereka belum dipengaruhi motivasi ideologis tertentu dan lebih didorong oleh konteks dinamika lingkungan politik lokal. Pemilih pemula mudah

²⁴ Sekretariat Jenderal KPU Biro Teknis dan Hupmas, "Modul: Pemilu untuk Pemula", (Jakarta: Penerbit Komisi Pemilihan Umum, 2010).

²⁵ Suhartono, "Tingkat Kesadaran Politik Pemilih Pemula dalam Pilkada; Suatu Refleksi School-Based Democracy Education (Studi Kasus Pilkada Provinsi Banten Jawa Barat)", (Hasil Penelitian, Pasca sarjana UPI, 2009) hal. 6.

dipengaruhi kepentingan-kepentingan tertentu, terutama oleh orang terdekat seperti anggota keluarga, mulai dari orang tua hingga kerabat dan teman.²⁶

2.3.2 Eksistensi Pemilih Pemula

Dalam Pemilu 2019, suara pemilih pemula kerap menjadi perbincangan di masyarakat. Hal ini terjadi bukan karena tanpa alasan, sebab berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan oleh Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri menunjukkan bahwa jumlah pemilih pemula pada Pemilu 2019 hampir mencapai 14 juta jiwa (Koran Sindo, 2017). Tentu ini bukan merupakan angka yang kecil di dalam kontestasi politik elektoral, terkhususnya di Indonesia. Dengan jumlah yang tinggi tersebut, berbagai pihak berhati-hati agar pemilih pemula memanfaatkan suara yang dimilikinya untuk memilih sbijak-bijaknya. Sosialisasi terkait anti golongan putih (golput) yang dilakukan Pemerintah terus digaungkan secara pasif untuk mencegah terbuang sia-sianya suara dari pemilih pemula ini.²⁷

2.3.3 Sumber informasi Pemilih Pemula

Informasi dari Calon Presiden dan Wakil Presiden merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui oleh para pemilih, khususnya pemilih pemula karena sebagian besar pemilih pemula masih minim produksi pengetahuan politiknya. Minimnya dari pengetahuan dan pemahaman politik pemilih pemula berimplikasi pada preferensi memilih mereka di dalam

²⁶ Litbang Kompas/Gianie, "Memetakan Minat Pemilih Pemula", (Online:www.Indonesiamemilih.com). Diakses pada 20 Desember 2019.

²⁷ Koran Sindo. (2017, December 16). Jumlah Pemilih Pemilu 2019 Mencapai 196, 5 juta orang.<https://nasional.sindonews.com/berita/1266242/12/jumlah-pemilih-pemilu-2019-mencapai-1965-juta-orang>

Pemilu. Namun saat ini, informasi bisa didapatkan secara mudah dari berbagai sumber yang ada (Lukman, Priyatna & Sani, 2017).²⁸

2.4 Teori Partisipasi Politik

Pengertian partisipasi politik sangat berhubungan dengan tipe sistem politik yang berlaku. Namun demikian dapatlah kita katakan bahwa partisipasi politik pada dasarnya yaitu kegiatan seseorang atau kelompok dalam kehidupan politik kenegaraan yang mencoba mengemukakan partisipasi politik dari berbagai aspek, Michael Rush dan Philip Althof (1990 : 123), misalnya, mengemukakan empat sudut pandang, yaitu:

1. Apa yang disebut partisipasi politik?
2. Berapa luas partisipasi politik itu?
3. Siapa yang berpartisipasi?
4. Mengapa mereka berpartisipasi?

Pada dasarnya setiap warga negara mempunyai hak untuk turut serta dan mempunyai keterlibatan dalam kehidupan bangsanya. Proses partisipasi politik itu sendiri bukanlah sesuatu yang “ langsung jadi “ pada warga negara, tetapi partisipasi politik itu sendiri banyak ragam dan bentuknya. Benar apa yang dikatakan oleh Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson (1990 : 9), bahwa :

“ Partisipasi politik mencakup tidak hanya kegiatan yang oleh pelakunya sendiri dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, akan tetapi juga kegiatan yang oleh orang lain di luar si pelaku dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan

²⁸ Lukman, S., Priyatna, C. C., & Sani, A. (2017). Pelatihan Literasi Komunikasi Politik

pemerintah. Yang pertama dinamakan partisipasi politik otonom dan yang yang terakhir partisipasi politik yang dimobilisasikan “.

Partisipasi politik sesuai dengan Huntington dan Joan Nelson adalah tingkah politik yang meliputi segala kegiatan yang memiliki hubungan politik untuk mempengaruhi pejabat pemerintahan dalam pengertian sebuah keputusan pemerintah. Menurut Prof. Miriam Budiardjo dalam bukunya yang berjudul “ Dasar-Dasar Ilmu Politik “ menyatakan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk bergabung secara aktif dalam kehidupan politik, diantara lain untuk memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Selain itu, menurut Herbert Miclosky partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat meliputi mana mereka melakukan peranan dalam cara pemilihan penguasa, baik secara langsung atau tidak langsung, pada penetapan kebijakan umum. Dan menurut Samuel P. Huntington & Joan M. Nelson, partisipasi politik membentuk kegiatan warga biasa yang bermaksud mempengaruhi pengambilan kebijakan oleh pemerintah. Ada beberapa hal substantif yang berkenaan dengan partisipasi, yaitu:

- a. Kegiatan-kegiatan yang jelas. Partisipasi politik yang juga memiliki kegiatan-kegiatan yang jelas adalah dengan kegiatan-kegiatan yang bisa dipelajari dengan benar, bukan sikap-sikap atau orientasi.
- b. Bersifat sukarela, yaitu kegiatan yang dimiliki oleh dirinya sendiri atau kesadaran sendiri (*self motion*), bukan dapat digerakkan oleh pihak lain, seperti ruang pemerintah, tekanan dan manipulasi.
- c. Dilakukan oleh warga negara atau masyarakat biasa, baik secara seorang ataupun kelompok masyarakat. Partisipasi politik yang dilakukan oleh warga negara atau

masyarakat biasa adalah membayangkan seakan-akan menutup rapay kesempatan pada perbuatan yang dilakukan oleh non warga negara biasa dalam kehidupan politik.

d. Mempunyai susunan-susunan partisipasi, yaitu yang bersangkutan dengan seseorang diandingkan dengan bentuk-bentuk partisipasi yang dapat dalam sistem dan susunan politik yang ada. Dari yang paling bawah sampai tingkatan yang paling tinggi, dari yang paling lengkap cakupannya sapai yang paling sedikit.

Salah satu hal yang paling penting dari demokrasi adalah partisipasi politik warga negara yang ada di suatu negar, ada dua yang dianggap benar yang mendasari ide ini, diantara lain:

Pertama adalah setiap warga negara merupakan bagian peranan yang paling mengerti dirinya dan dunianya secara lebih baik, bukan orang yang menjadi di luar dirinya sendiri dan pembangunan.

Kedua adalah partisipasi politik tetap bersangkutan dengan kebijakan publik, baik yang mengenai masyarakat banyak ataupun individu. Konsep partisipasi politik juga banyak dihubungkan dengan proses dan perkembangan sosial-ekonomi. Ada dua pandangan yang mendasari relasi antara kedua konsep tersebut, yaitu mengunjungi partisipasi politik sebagai alat dan sarana untuk memajukan sebuah proses.²⁹

Argumentasinya adalah sebuah proses dan pembentukan yang merupakan sebuah keputusan politik penting yang mempengaruhi seluruh hal kehidupan masyarakat sehingga apapun alasannya, warga masyarakat yang terikat pada pengaruh dari cara proses dan pembentukan tersebut wajib ikut menetapkan cara tersebut. Selanjutnya, melihat partisipasi sebagai fungsi atau proses output pembentukan sosial-ekonomi. Untuk dapat dilakukan

²⁹ Drs Idrus Affandi, S.H., M.Pd. Penelitian Partisipasi Politik Generasi Muda Dalam Rangka Pembangunan Politik Dalam Negeri di Jawa Barat, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bandung, 1995, hlm 8-10.

partisipasi politik yang sempurna, dibutuhkan suatu undang-undang yang cukup dan kekayaan nasional. Kedua pandangan tersebut terkait tentang hubungan antara partisipasi dengan proses ini merupakan pembagian yang tipologis sifatnya karena dalam kebenarannya perbedaan ini tidak terlalu keras. Tetapi, satu hal yang dimengerti yaitu, partisipasi dilihat sebagai hal yang penting dalam masyarakat yang demokratis seperti sekarang ini.

Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa partisipasi merupakan perilaku yang berwujud keikutsertaan masyarakat pada suatu kegiatan yang khusus. Partisipasi politik dapat diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat pada kegiatan politik. Keikutsertaan masyarakat tersebut tercapainya dalam sikap dan perbuatannya sebagai wujud dari reaksi yang terdapat pada produk-produk politik. Ketika akan melakukan suatu langkah politik, secara individu atau sekumpulan orang (masyarakat harus melakukan tiga keputusan, yaitu:

- a. Menentukan langkah atau tidak,
- b. Menentukan tujuan dari langkah itu,
- c. Menentukan tentang kekuatan dan lamanya langkah politik tersebut.

Perbedaan wujud partisipasi politik seseorang sangat dipengaruhi oleh pengetahuan dan kesadaran politiknya serta kepercayaan terhadap sistem politik yang dianutnya. Pada masyarakat yang serba majemuk dengan stratifikasi sosial yang beragam, keterlibatan politik warga negaranya tidaklah sama dan seragam, bahkan ada kecenderungan pada masyarakat yang tradisional, unsur golongan elit pemerintah masih sangat dominan dalam menentukan hal ihwal kehidupan kenegaraan. Hal ini pernah dikemukakan oleh Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson (1990 : 1), bahwa:

“Di dalam masyarakat tradisional, pemerintah dan politik biasanya hanya merupakan unsur satu golongan elit yang kecil, petani, tukang dan pedagang yang merupakan bagian dari penduduk yang paling besar menyadari atau tidak bagaimana tindakan-tindakan pemerintah

mempengaruhi kehidupan mereka sendiri. Akan tetapi biasanya tidak sampai terpikir oleh mereka bahwa mereka dapat atau perlu berusaha untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah”.³⁰

2.4.1 Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik

Partisipasi aktif masyarakat dalam politik dapat dijadikan bisa sebagai mekanisme dalam mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan pembangunan bahkan sebagai alat kontrol terhadap penyelewengan politik. Beberapa bentuk partisipasi politik masyarakat yang dapat kita lihat diantaranya yaitu menghadiri rapat umum, anggota partai/kelompok kepentingan, membicarakan masalah politik, mengikuti perkembangan politik melalui media massa, memberikan suara dalam pemilihan umum, menduduki jabatan politik atau administrative, keanggotaan pasif suatu organisasi politik, partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, partisipasi dalam diskusi politik informal dan lain-lain.

Di samping itu, Jeffery M. Paige mengemukakan empat berbagai partisipasi politik, yakni pengetahuan/ kesadaran politik masyarakat tinggi dan kepercayaan mereka terhadap sistem politik serta tinggi, sehingga mereka akan berpartisipasi secara aktif. Partisipasi mereka itu sehat karena mereka loyal dan mendukung sistem politik yang ada. Macam dan tipe partisipasi yang kedua terjadi kala pengetahuan/kesadaran politik yang tinggi dibarengi oleh kepercayaan rendah terhadap sistem politik yang berlaku. Suasana ini mengundang adanya sikap dan tingkah laku yang tampak membangkan (dissidenti), disertai sikap kurang atau tidak responsive dari mereka yang berkuasa dalam sistem politik itu.

Tipe partisipasi politik ketiga terjadi bila pengetahuan/kesadaran politik yang rendah berkaitan dengan kepercayaan yang tinggi terhadap sistem politik. Dalam suasana seperti ini,

³⁰ Burhanudin. “Kesadaran Politik dan Partisipasi Politik: (Studi Kasus Pengaruh Tingkat Kesadaran Politik Terhadap partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu 2019 di Gantungan, Jatinegara , Tegal., Jawa Tengah)”, UIN Syarif Hidayatullah, 2021. Diakses pada 28 Mei 2022. <https://repository.uinjkt.ac.id>

masyarakat memang tidak aktif berpolitik, tetapi secara diam-diam mereka dapat menerima sistem politik yang berlaku. Tipe ini biasanya terjadi dalam sistem politik yang tradisional. Macam partisipasi politik yang berlaku. Tipe ini biasanya terjadi dalam sistem politik yang tradisional. Macam partisipasi politik yang keempat muncul bilamana pengetahuan/kesadaran politik yang rendah dan vertalian dengan kepercayaan yang rendah pula terhadap sistem politik. Dalam hal ini, walaupun masyarakat bersikap pasif, namun dalam kepasifan itu mereka tertekan, terutama oleh karena perlakuan yang mereka anggap sewenang-wenang dari penguasa. (Alfan 1986 : 255-257).

Pada kenyataannya di masyarakat masih saja terdapat orang-orang yang berisifat apatis terhadap persoalan politik. Morris Resenberg mensugestion tiga alasan pokok untuk menerangkan apatis politik, sebagai berikut:

Alasan pertama adalah konsekuensi yang ditanggung dari aktivitas politik. Hal ini dapat mengambil beberapa bentuk: individu dapat meresahkan, bahwa aktivitas politik merupakan ancaman terhadap berbagai aspek kehidupan. Kedua bahwa individu dapat menganggap aktivitas politik sebagai sia-sia saja. Sebagai individu, dia mungkin merasa tidak mampu sama sekali mempengaruhi jalannya peristiwa dan kekuatan politik yang bersifat bagaimana pun ada di luar kontrol individu.

Dilihat dari fungsinya, partisipasi politik mempunyai keterikatan dengan berbagai kebutuhan yang mendasarinya. Robert Lane (rush dan Althoff, 1990 : 181-182) mengemukakan empat fungsi dari partisipasi politik, yaitu pertama, sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomis, kedua, sebagai sarana untuk memuaskan kebutuhan bagi penyesuaian sosial; ketiga, sebagai sarana untuk mengejar nilai-nilai khusus; dan keempat, sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan bawah sadar dan kebutuhan psikologis tertentu.³¹

³¹ Retno Herningrum Pratiwi. " Partisipasi Politik Pemilih Pemula Penyandang Disabilitas Tuna Rungu Anggota DPC Gerkatina Jakarta Selatan Pada Pilkada Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017, UNNES, 202. Diakses pada 01 Juni 2022. <http://lib.unnes.ac.id>

2.4.2 Fungsi Partisipasi Politik

Pakar ilmu politik Huntington dan Nelson (1977) telah membedakan antara partisipasi yang bersifat otonom (*autonomous participation*) dan partisipasi yang dimobilisasi atau digerakkan oleh pihak lain (*mobilized participation*). Partisipasi yang bersifat otonom (*autonomous participation*) itu, merupakan bentuk partisipasi yang dilakukan secara sukarela oleh warga negara yang dapat dikatakan sebagai bentuk dari efektnya sosialisasi politik dan komunikasi politik. Warga negara yang pada umumnya berpendidikan, sadar bahwa keterlibatannya dalam berbagai kegiatan politik memiliki manfaat dan efek politik (*political efficacy*).

Sebaliknya partisipasi politik yang dimobilisasi (*mobilized participation*) adalah bentuk partisipasi politik yang tidak sukarela, tetapi digerakkan oleh partai politik, kandidat, tim sukses atau pejabat pemerintah. Warga negara yang pada umumnya kurang berpendidikan, belum menyadari tentang hak dan kedaulatan yang dimilikinya, sehingga perlu digerakkan. Hal itu dapat berbentuk “intimidasi” atau berbentuk “politik uang” (*money politics*), sebagaimana yang terjadi di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Partisipasi politik yang dimobilisasi itu, dapat juga dikatakan sebagai akibat dari tidak efektifnya sosialisasi politik dan komunikasi politik persuasif dan edukatif dari partai politik atau pemerintah. Justru ini digunakan komunikasi politik *koersif*.

Selain itu, Huntington dan Nelson (1977) juga menyebut bahwa selain partisipasi yang bersifat positif seperti yang dipaparkan di muka, terdapat juga bentuk partisipasi yang bersifat negatif, seperti melakukan demonstrasi, teror politik dan pembunuhan politik. Hal itu dapat dimasukkan dalam kelompok “khalayak kepala batu” dalam komunikasi politik yang tidak efektif. “khalayak kepala batu” yang lain dalam komunikasi politik, ialah orang-orang

yang disebut apati (*apathy*) yaitu warga negara yang sama sekali tidak mau melibatkan diri dalam kegiatan politik, karena berbagai macam sebab.

Charles Andrian James Smith (2006: 6-7) juga mengelompokkan partisipasi politik sebagai bagian dari partisipasi secara umum ke dalam tiga *bentuk partisipasi*, yaitu: (1) partisipasi yang lebih ke pasif, (2) partisipasi yang lebih aktif, dan (3) partisipasi yang berupa kegiatan-kegiatan protes.

Kelompok yang pertama (partisipasi pasif) adalah orang-orang yang memiliki minat terhadap politik, karena memandang politik itu sebagai sesuatu yang penting dan sering melakukan diskusi publik dengan kawan-kawannya, namun tidak terlibat atau tidak aktif dalam organisasi sosial. Kelompok yang kedua (partisipasi aktif) ialah orang-orang yang aktif dalam organisasi sosial. Sedangkan kelompok yang ketiga (partisipasi dalam kegiatan protes), ialah orang-orang yang ikut dalam demonstrasi, menandatangani petisi, atau melakukan boikot.

Anwar Arifin (2011), kemudian menambahkan bahwa dalam kelompok ketiga itu termasuk orang-orang yang menamakan dirinya *golput* (golongan putih) yang sengaja tidak mau datang memberikan suaranya dalam pemilihan umum. Hal itu dilakukan oleh golput terutama sebagai bentuk protes kepada rezim yang berkuasa.³²

2.4.3 Tujuan Partisipasi Politik

Partisipasi politik memiliki tujuan yang tidak kalah pentingnya ialah memengaruhi kebijakan politik atau kebijakan publik (*public policy*) dalam segala segi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kebijakan politik merupakan strategi pokok kehidupan suatu negara atau garis besar suatu negara, yaitu apa yang dilakukan oleh pemerintah yang didasarkan kepada hukum.

³² Prof. Dr. Anwar Arifin, *Perspektif Ilmu Politik*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta:2015), hlm. 82.

Partisipasi dalam memengaruhi kebijakan politik atau kebijakan publik itu, hanya dapat terjadi jika politikus dan partai politiknya memenangi pemilihan umum termasuk pilpres (pemilihan presiden) atau pemilukada (pemilihan umum kepala daerah). salah satu tujuan yang sangat penting dan strategis dari seluruh aktivitas sosialisasi politik dalam kaitannya dengan pemilihan umum bagi politikus dan partai politiknya, ialah memperoleh dan mempertahankan kekuasaan atau kedudukan politik. Dengan kekuasaan atau kedudukan politik itu, politikus dapat berperan aktif dalam membuat dan merumuskan kebijakan politik, atau dapat memengaruhi kebijakan politik sebagaimana yang dijanjikan dalam kampanye pemilihan umum.³³

2.4.4 Faktor-faktor Partisipasi Politik

Istilah partisipasi politik berasal dari bahasa Inggris “participation” yang dapat diartikan sebagai kegiatan atau keikutsertaan seseorang. Sejalan dengan hal tersebut, Milbrath dan Goel menyatakan terdapat beberapa pengaruh partisipasi seseorang diantaranya:

Pertama, dalam hal ini Milbrath dan Goel merujuk kepada penerimaan seseorang terhadap perangsang politik. Keterbukaan dan kepekaan seseorang terhadap rangsangan politik dapat mempengaruhi seseorang untuk ikut serta dalam kegiatan politik. hal ini dapat berupa rangsangan politik melalui kontak pribadi, organisasi serta media massa. Melalui keikutsertaan seseorang dalam aktivitas politik di media massa dapat juga menjadi pengaruh meningkatnya partisipasi politik seseorang. Hal ini dikarenakan seiring banyaknya pengetahuan, informasi aktual serta pengalaman yang didapatkan dari media massa khususnya elektronik dapat juga merubah sikap serta pola pikir seseorang terlebih bagi pemilih pemula.

³³ Ibid. Hlm 86.

Kedua, Milbrath dan Goel menjelaskan bahwa karakteristik sosial juga merupakan sebuah pengaruh partisipasi politik seseorang. Bahkan menjadi pengaruh yang cukup kuat dalam berpartisipasi. Sebagai contoh adalah status ekonomi, karakter suku, usia, jenis kelamin serta keyakinan (agama).

Ketiga, menyangkut sistem politik atau sistem partai dimana seseorang hidup. Seseorang yang hidup dalam negara demoratis cenderung berpartisipasi dalam politik karena partai-partai politiknya cenderung mencari dukungan massa dan memperjuangkan kepentingan massa.

Keempat, pengaruh yang terakhir menurut Milbrath dan Goel adalah perbedaan regional. Perbedaan regional ini merujuk kepada perbedaan watak, dan tingkah laku individu yang berpengaruh terhadap perilaku dan partisipasi politik seseorang. Keadaan daerah yang aman dan kondusif dapat menunjang keinginan masyarakat serta pemilih pemula untuk ikut serta dalam kegiatan politik tanpa adanya suatu hal yang otoriter.³⁴

Selanjutnya, menurut Burdiardjo (2008) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik seseorang:

a. Faktor Sosial Ekonomi

Faktor Sosial Ekonomi meliputi pendapatan, tingkat pendidikan, pekerjaan, ras, jenis kelamin, status, usia, serta organisasi.

b. Faktor Politik

Faktor Politik ini meliputi:

³⁴ Regina Singestecia. "Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa Dalam Pilkada Langsung Di Slawi Kabupaten Tegal, UNNES, 2017. Diakses pada 04 Juni 2022. <http://lib.unnes.ac.id>

a. Komunikasi Politik yang memiliki konsekuensi politik baik secara aktual maupun potensial serta dapat mengatur sikap seseorang dalam suatu konflik yang terjadi. Komunikasi politik juga merupakan komunikasi yang sangat menerapkan etika.

b. Kesadaran politik yang menyangkut pengetahuan, minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik. Hal ini juga dapat diartikan sebagai tanda bahwa masyarakat memiliki kesadaran serta perhatian terhadap pemerintahan negaranya.

c. Pengetahuan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan yang dapat menentukan corak serta arah suatu keputusan yang akan diambil. Kontrol masyarakat terhadap kebijakan publik sama halnya dengan masyarakat memiliki wewenang untuk mengelola suatu obyek kebijakan tertentu. Hal ini juga dapat untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam keputusan politik.³⁵

c. Faktor Fisik individu dan Lingkungan

Faktor fisik individu dapat berupa fasilitas serta ketersediaan pelayanan umum. Sedangkan faktor lingkungan adalah kesatuan ruang dan semua benda, daya, keadaan, kondisi dan makhluk hidup serta berlangsungnya berbagai kegiatan interaksi sosial.

d. Faktor Nilai Budaya

Faktor ini juga dikenal sebagai *civic culture* yang merupakan dasar yang membentuk demokrasi, hakekatnya adalah politik baik etika, tehnik maupun peradaban masyarakat. Faktor ini menyangkut beberapa hal seperti persepsi, pengetahuan, sikap, dan kepercayaan politik.

³⁵ Ibid

2.4.5 Faktor-faktor Pendukung Partisipasi Politik Pemilih Pemula

Menurut Milbrath dalam Sastroatmodjo (1995: 92) memberikan alasan partisipasi politik seseorang. Pertama, berkenaan dengan penerimaan perangsang politik. Milbrath mengatakan bahwa keterbukaan dan kepekaan seseorang terhadap pembangkit politik melalui kontak-kontak pribadi, organisasi, dan melalui media massa akan berpengaruh bagi keikutsertaan seseorang dalam kegiatan politik. Keterbukaan dan kepekaannya menerima perangsang politik melalui media massa akan mendorong seseorang secara aktif perkembangan-perkembangan politik melalui media massa, seseorang akan memiliki referensi yang cukup aktual untuk memberikan tanggapan dan akhirnya sebagai bahan dalam partisipasi politiknya. Meskipun demikian dalam menanggapi perangsang-perangsang politik itu tentu dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap, nilai-nilai, pengalaman-pengalaman, dan kepribadian yang dimiliki seseorang. Pemilih pemula terdorong untuk ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Umum karena ada rangsangan dari media massa atau elektronik.

Kedua, menyangkut sistem politik dan sistem partai tempat seorang individu itu hidup dengan seseorang yang hidup dalam negara demokratis cenderung berpartisipasi dalam politik karena partai-partai politiknya cenderung mencari dukungan massa dan memperjuangkan kepentingan massa. Para pemilih pemula mempunyai karakteristik pribadi sosial yang berbeda-beda, namun dari berbagai macam perbedaan itu para pemilih pemula cukup banyak yang peduli dan sadar akan hak politik mereka, peran mereka sebagai masyarakat.³⁶

2.4.6 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Politik Pemilih Pemula

Dalam sistem politik kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam suatu kegiatan yang dilakukan langsung oleh masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan langsung oleh

³⁶ Ibid

masyarakat adalah suatu kegiatan partisipasi politik. Kegiatan yang merupakan aktivitas yang dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Menurut Ramlan Surbakti, ada dua variabel penting yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik masyarakat secara individual, yaitu;

Pertama, sistem politik pemerintahan yang dimulai dari aspek kesadaran politik yang dimaksud dalam kesadaran politik ialah kesadaran hak dan kewajiban warga negara. Misalnya, hak politik, hak ekonomi, hak perlindungan hukum, kewajiban ekonomi, kewajiban sosial dan lain-lain.

Kedua, apresiasi masyarakat serta penilaian terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahnya. Dari kedua faktor yang dijelaskan di atas dapat dikatakan rendah karena dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, yaitu faktor status sosial yang kedudukan seseorang berdasarkan keturunan, pendidikan, pekerjaan dan lainnya. Afiliasi politik orang tua, dan pengalaman berorganisasi. Keberagaman dalam pengertian partisipasi politik hanya beragam, sehingga dapat ditemukan oleh banyak ahli. Pengertian partisipasi politik yang dijelaskan oleh beberapa para ahli, yaitu;

Menurut Ramlan Surbakti yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.³⁷

Miriam Budiardjo secara umum mengartikan kegiatan seseorang atau kelompok dalam keikutsertaan secara aktif dalam kehidupan berpolitik dengan jalan memilih pemimpin

³⁷ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta; PT. Gramedia Widisarana Indonesia, 2007), hlm.140.

negara secara langsung maupun tidak langsung dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*) merupakan kegiatan partisipasi politik.³⁸

Sedangkan partisipasi politik Menurut Keith Faulks adalah keterlibatan aktif individu maupun kelompok dalam proses pemerintahan yang berdampak pada kehidupan mereka. Hal ini meliputi keterlibatan dalam proses aktif. Dari beberapa pendapat para ahli tersebut maka yang dimaksud partisipasi politik adalah adanya kegiatan atau keikutsertaan warga negara dalam proses pemerintahan. Kemudian kegiatan tersebut diarahkan untuk memengaruhi jalannya pemerintahan, sehingga dengan adanya partisipasi politik tersebut akan berpengaruh terhadap kehidupan mereka.³⁹

Pengaruh pemilih muda yang penting dan signifikan pada Pemilu sudah disadari oleh Partai Politik peserta Pemilu dan para calon kandidatnya. Bahkan perburuan suara pemilih muda sudah dimulai sejak Pemilu yang sudah diselenggarakan selama dua tahun terakhir yaitu banyak yang sudah mulai memperhitungkan suara dari pemilih pemula dalam proses kampanye sehingga tidak jarang berbagai cara dilakukan untuk bisa menghimpun suara para pemilih muda ini. Salah satu harus menjadi perhatian khusus adalah pendidikan politik yang masih rendah di kalangan pemilih muda atau bisa disebut juga sebagai pemilih pemula tersebut. Pendidikan politik yang masih rendah membuat kelompok ini rentan dijadikan sasaran untuk dimobilisasi oleh kepentingan-kepentingan tertentu.

Menurut Milbrath, berkenaan dengan karakteristik sosial seseorang. Status ekonomi, karakter suku, usia, jenis kelamin, dan agama, merupakan karakteristik sosial yang memiliki pengaruh terhadap partisipasi politik. Para pemilih pemula mempunyai karakteristik pribadi sosial yang berbeda-beda, namun dari berbagai macam perbedaan itu para pemilih pemula

³⁸ Sudijono Sastrodmojo, *Perilaku Politik*, (Semarang : Ikip Semarang Press, 1995), hlm. 68.

³⁹ Keith Faulks, *Sosiologi Politik* (Bandung : Nusa Media, 2010), hlm. 226.

cukup banyak peduli dan sadar akan hak politik mereka sebagai masyarakat. Mereka mau berpartisipasi dalam pemilu dengan datang ke TPS dimana mereka tinggal sesuai dengan undangan yang mereka dapat. Perbedaan regional merupakan aspek lingkungan yang berpengaruh terhadap perbedaan watak dan tingkah laku individu, sehingga mendorong perbedaan perilaku politik dan partisipasi politik seseorang. Hampir setiap daerahnya aman dan kondusif, sehingga semua masyarakat dapat berpartisipasi dalam pemilu termasuk para pemilih pemula. Para pemilih pemula di berpartisipasi dalam pemilu berdasarkan keinginan mereka sendiri, tidak adanya arahan dari pihak lain, tidak adanya suatu hal yang otoriter.

Rasa minder ialah disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah atau minimnya pengalaman dalam kegiatan politik maupun tingkat sosial ekonomi yang rendah. Menurut Mohtar Mas'ood disamping pendidikan dan sosial ekonomi perbedaan jenis kelamin juga mempengaruhi keaktifan seseorang berpartisipasi dalam politik. Misalnya, laki-laki lebih aktif berpartisipasi dari pada perempuan, orang yang berstatus sosial rendah (Mohtar Mas'ood, 2008: 61). Mereka merasa tidak berhak tampil dalam kegiatan politik dari pada mereka yang punya status sosial ekonomi yang tinggi dan pengalaman yang memadai. Mereka menyadari bahwa kenyataan yang ada dalam masyarakat adalah politik lebih berhak bagi mereka yang punya pengalaman dan mempunyai status sosial ekonomi yang cukup. Keikutsertaan pemilih pemula dalam dunia politik, bagi beberapa pemilih pemula adalah satu hal yang istimewa. Sehingga mereka berpendapat bahwa yang berhak untuk terjun dalam dunia politik adalah orang-orang kaya, berpendidikan ataupun orang yang sudah berpengalaman dalam dunia politik.

Pihak keluarga juga merupakan faktor yang berpengaruh besar dalam kehidupan seseorang. Pihak keluarga dapat mendukung atau bahkan menentang perilaku anggota

keluarga yang lain. Jika pihak keluarga sudah tidak mendukung keputusan seseorang, maka orang tersebut lebih banyak mengurungkan niatnya ⁴⁰

2.5 Kerangka Pemikiran



Bagan 1.1

Bagian kerangka pemikiran ini, penulis memaparkan alur penelitian penulis dengan empat konsep kerangka pemikiran.

Melihat naiknya tingkat partisipasi pemilih pemula pada Pemilu 2019, maka dalam penelitian ini Penulis berupaya meneliti seberapa besarnya faktor meneliti perilaku pemilih pemula khususnya pemilih pemula di Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur pada Pemilu 2019.

Dengan berlandaskan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perilaku memilih, teori partisipasi politik dan pengertian pemilih pemula. Setelah mengetahui perilaku pemilih pemula di Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit dengan melakukan

⁴⁰ Nur Wardhani, "Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum", *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 10, No. 1 (2018).

wawancara mendalam kepada pemilih pemula di Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit, penulis akan berupaya meneliti bagaimana perilaku pemilih pemula dengan teori-teori yang relevan..

